

## **Analisis Sektor Lapangan Usaha Pendukung Ekonomi Daerah Dalam Penyusunan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045**

**Nofendri**

Perencana Ahli Muda Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan  
e-mail: [nofenbuchari@gmail.com](mailto:nofenbuchari@gmail.com)

### **Abstrak**

Kajian ini dilakukan untuk memetakan sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendorong perekonomian daerah dalam menentukan arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya alam yang banyak seperti sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan sektor pariwisata yang dapat mendorong pertumbuhan sektor lapangan usaha lain. Sumber daya alam tersebut belum dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, hal ini disebabkan oleh arah kebijakan pada dokumen perencanaan belum tepat sesuai dengan sektor lapangan usaha unggulan. Analisis kuantitatif deskriptif melalui data sekunder yang berasal dari publikasi data Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Provinsi dilakukan dengan metode Location Quotient (LQ). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada empat yang menjadi sektor lapangan usaha yang dapat mendukung perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor konstruksi; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; sektor informasi dan komunikasi. Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka penyusunan arah kebijakan RPPD Tahun 2025-2045.

**Kata kunci:** *Lapangan Usaha, Location Quotient, Pendukung Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan*

### **Abstract**

This study was carried out to map the leading sectors in Pesisir Selatan Regency to encourage the regional economy in determining the policy direction of the 2025-2045 RPJPD. Pesisir Selatan Regency has many natural resources such as the agricultural, fisheries, forestry and tourism sectors. The large number of natural resources cannot be managed adequately to improve the economy and community welfare, this is due to limited regional fiscal capacity and human resources. Descriptive quantitative analysis using secondary data derived from published data from the District and Provincial Central Statistics Agency was carried out using the Location Quotient (LQ) method. The research

results show that there are four business sectors that can support the economy of Pesisir Selatan Regency, namely: Agriculture, Forestry and Fisheries Sectors; Construction sector; Government Administration, Defense and Mandatory Social Security Sectors; information and communications sector. The research results can be used as input in preparing the 2025-2045 RPPD policy direction.

**Keywords** : *Business Fields, Location Quotient, Regional Economic Support, Policy Direction*

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengatur perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Perencanaan didefinisikan sebagai proses penentuan tindakan masa depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan perencanaan adalah mempersiapkan kegiatan secara sistematis untuk mencapai suatu target. Melalui perencanaan, dilakukan perkiraan terhadap perubahan internal dan eksternal, menghitung potensi, prospek perkembangan, serta mengidentifikasi hambatan dan risiko. Perencanaan bertujuan untuk minimalisir ketidakpastian sekecil mungkin. Rencana pembangunan daerah disusun oleh daerah sesuai kewenangannya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana ini menjadi dasar untuk implementasi program dan kegiatan oleh dinas teknis dalam sektor yang bersangkutan (Tan, 2010).

Kabupaten Pesisir Selatan saat ini mengikuti perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, terdapat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021. RPJMD ini merupakan implementasi dari periode terakhir RPJPD Tahun 2005-2025. Visi Kepala Daerah terpilih untuk RPJMD Tahun 2021-2026 adalah "Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Martabat Didukung Pemerintah yang Akuntabel dan Profesional." Visi ini diterjemahkan ke dalam enam Misi utama, melibatkan perkuatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan ekonomi daerah, pengembangan pariwisata, peningkatan pendidikan berkualitas, dan penciptaan kondisi masyarakat yang aman dan dinamis.

Kabupaten Pesisir Selatan saat ini sedang merancang Rancangan Awal Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. RPJPD ini menjadi pedoman pembangunan jangka panjang selama 20 tahun, menggantikan periode RPJPD Tahun 2005-2025. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

RPJPD merupakan dokumen perencanaan makro yang mencakup kondisi umum daerah, proyeksi masa depan, visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan.

Tujuan utama penyusunan RPJPD adalah memberikan arah yang jelas untuk pembangunan jangka panjang, menjadi dasar untuk penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lebih pendek seperti RPJMD dan RKPD. Sinergi dan integrasi dengan pembangunan nasional menjadi fokus dalam penyusunan RPJPD.

Proses penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan melibatkan pendekatan teknokratik dan partisipatif. Pendekatan teknokratis menekankan penggunaan pengetahuan dan teknologi, mengandalkan keahlian akademisi dan praktisi pembangunan (Dabengwa et al., 2023). Ini berfokus pada menemukan solusi untuk masalah melalui kemajuan ilmiah dan teknologi. Di sisi lain, pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan mereka (Tora et al., 2022). Ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan partisipasi aktif mereka. Pendekatan ini mengakui bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan berharga yang dapat berkontribusi pada proses pengembangan (Leolmin, 2021). Dengan berjejaring dan berkolaborasi dengan masyarakat, pendekatan partisipatif bertujuan untuk menciptakan rasa kepemilikan dan pemberdayaan di antara masyarakat.

Orientasi substansi penyusunan RPJPD menggabungkan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik menganggap seluruh pengembangan sebagai entitas tunggal yang saling berhubungan, dengan mempertimbangkan semua elemennya (Høyland et al., 2022). Pendekatan integratif menyatukan beberapa otoritas dalam proses terpadu dengan fokus yang jelas (Barekowski & Wojtyra, 2018). Pendekatan spasial mempertimbangkan dimensi kerugian dalam perencanaan, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari berbagai area atau situs. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan proses perencanaan yang komprehensif dan inklusif yang mengatasi tantangan dan peluang unik dari setiap lokasi. Dengan menggabungkan pendekatan ini, orientasi substansi penyusunan RPJPD bertujuan untuk menciptakan proses perencanaan holistik, terintegrasi, dan terinformasi spasial yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan adil.

Ranwal RPJPD Tahun 2025-2045 memiliki visi "Pesisir Selatan Maju, Berbudaya, Berkelanjutan Berbasis Agro Industri dan Pariwisata" dengan tujuh misi, antara lain transformasi sosial untuk sumber daya manusia berkualitas, transformasi ekonomi berbasis agro industri dan pariwisata, transformasi tata kelola untuk birokrasi yang profesional, mewujudkan stabilitas dan ketentraman umum daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan, serta implementasi kebijakan untuk kesinambungan pembangunan.

Dalam RPJPD Tahun 2025-2045, visi dan misi dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan untuk mencapai kedelapan misi tersebut selama periode 20 tahun. Keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada formulasi strategi dan arah kebijakan yang tepat dan terarah. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pembangunan harus memperhatikan visi, misi, potensi daerah, kondisi, permasalahan pokok pembangunan, dan proyeksi pembangunan kedepan.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beragam potensi sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, perairan, dan lainnya yang dapat dijadikan modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu dilakukan kajian terhadap sektor lapangan usaha yang akan menjadi unggulan untuk dikembangkan.

Untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dan terarah, dilakukan analisis potensi lapangan usaha daerah Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan Metode *Location Quotient* (LQ). Metode ini dipilih karena dapat menjadi landasan untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi daerah. Policy Paper ini juga akan merumuskan arah kebijakan berdasarkan permasalahan pokok sesuai sektor basis tersebut.

## METODE

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah Analisis Location Quotient (LQ). Metode ini digunakan untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang termasuk sektor basis atau berpotensi ekspor, dan sektor mana yang bukan merupakan sektor basis (Tarigan, 2004)

$$LQ = \frac{S_{ij}/S_j}{S_{in}/S_n}$$

Dimana:

- $S_{ij}$  : PDRB pada sektor i pada wilayah analisis j
- $S_j$  : PDRB pada wilayah analisis j
- $S_{in}$  : PDB pada sektor i di wilayah referensi
- $S_n$  : PDB di wilayah referensi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pemetaan sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Analisa LQ akan menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Pesisir Selatan dengan melihat keunggulan kompetitif Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data PDRB Tahun 2013-2022 yang di publish oleh Badan Pusat Statistik.

**Tabel 1. PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2022**

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.797,0	2.952,0	3.116,0	3.185,0	3.286,0	3.397,0	3.492,0	3.489,0	3.603,0	3.740,0
Pertambangan dan Penggalian	272,8	283,4	296,6	313,6	322,9	336,6	357,5	344,9	347,6	355,16
Industri Pengolahan	90,13	80,60	30,00	10,00	20,00	20,00	30,00	70,00	20,00	0,00
	613,7	652,4	681,3	726,9	740,2	763,2	722,6	700,3	725,4	741,26
	18,77	90,92	10,00	20,00	30,00	50,00	40,00	70,00	40,00	0,00

Pengadaan Listrik dan Gas	2.184,43	2.437,18	2.540,00	2.800,00	2.950,00	3.110,00	3.210,00	3.050,00	3.080,00	3.230,00
Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.160,90	5.379,00	5.600,00	5.950,00	6.210,00	6.370,00	6.580,00	6.500,00	6.660,00	6.780,00
Konstruksi	661.833,83	701.764,15	744.810,00	802.540,00	878.640,00	946.620,00	1.029.870,00	969.750,00	983.930,00	1.010.510,00
Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	817.247,13	888.870,62	941.560,00	1.007.370,00	1.088.210,00	1.165.040,00	1.262.520,00	1.257.580,00	1.297.620,00	1.373.120,00
Transportasi dan Pergudangan	250.617,54	272.286,63	294.010,00	319.570,00	347.280,00	375.380,00	405.900,00	360.630,00	382.490,00	399.220,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	68.340,68	70.823,89	75.860,00	84.160,00	93.230,00	100.790,00	108.890,00	94.710,00	101.200,00	112.430,00
Infromasi dan Komunikasi	448.398,50	475.114,70	515.870,00	566.210,00	626.990,00	684.570,00	745.460,00	799.210,00	851.900,00	913.300,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	162.643,66	167.161,73	173.520,00	185.020,00	188.720,00	189.670,00	194.790,00	195.350,00	206.740,00	214.360,00
Real Estat	98.770,36	104.642,28	110.700,00	117.150,00	123.250,00	128.880,00	135.870,00	135.940,00	137.980,00	142.960,00
Jasa Perusahaan	3.808,52	4.013,55	4.230,00	4.450,00	4.680,00	4.940,00	5.250,00	5.040,00	5.040,00	5.260,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	441.958,18	447.415,88	462.300,00	486.310,00	511.310,00	547.330,00	576.010,00	572.040,00	577.510,00	571.050,00
Jasa Pendidikan	187.883,71	199.842,26	216.160,00	235.980,00	252.430,00	268.260,00	288.680,00	300.800,00	312.260,00	327.450,00
Jasa Kesehatan Kegiatan Sosial	85.826,12	92.456,62	99.180,00	104.660,00	112.930,00	121.480,00	130.610,00	139.140,00	147.450,00	154.250,00
Jasa Lainnya	68.081,62	71.608,24	75.350,00	84.380,00	91.810,00	99.880,00	110.770,00	95.980,00	100.080,00	112.230,00
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>6.986.968,48</b>	<b>7.392.536,45</b>	<b>7.816.200,00</b>	<b>8.232.600,00</b>	<b>8.678.040,00</b>	<b>9.139.970,00</b>	<b>9.576.670,00</b>	<b>9.470.790,00</b>	<b>9.790.350,00</b>	<b>10.183.460,00</b>

Sumber Data: Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2013-2022

**Tabel 2. PDRB Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2022 (dalam Juta Rupiah)**

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30.372 .990,9 7	32.151 .489,7 1	33.54 6.757, 19	34.22 2.561, 72	35.394 .694,2 1	36.63 9.598, 72	37.54 9.456, 64	37.99 3.394, 56	38.82 0.905, 33	40.189 .080,9 8
Pertambangan dan Penggalian	5.722. 821,29	5.923. 565,21	6.144. 577,4 5	6.267. 606,7 6	6.338. 267,17	6.705. 049,4 3	7.121. 860,2 5	7.028. 907,6 2	6.904. 546,0 1	7.038. 276,95
Industri Pengolahan	14.388 .523,3 0	15.140 .071,8 8	15.41 8.540, 17	16.17 4.096, 85	16.540 .818,1 2	16.44 4.840, 00	16.11 8.645, 66	16.03 1.823, 24	16.62 8.389, 80	16.917 .966,1 8
Pengadaan Listrik dan Gas	120.83 7,18	140.01 1,69	145.6 86,13	161.6 28,93	168.19 6,62	175.0 79,95	182.4 41,03	170.0 25,43	175.3 72,89	181.00 7,39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	128.68 6,93	133.69 6,91	141.7 07,83	150.7 71,11	156.73 6,19	160.2 40,92	170.0 12,80	168.2 52,33	177.5 55,32	185.32 0,89
Konstruksi	10.825 .242,3 6	11.523 .579,9 1	12.31 5.040, 24	13.12 6.836, 91	14.075 .895,5 8	15.06 1.089, 08	16.33 6.311, 64	15.85 4.144, 46	16.20 0.236, 34	16.607 .627,0 6
Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.442 .017,7 9	20.523 .147,0 3	21.62 6.609, 65	22.79 6.932, 47	24.279 .260,4 5	25.97 6.541, 84	27.86 9.924, 72	27.55 2.851, 94	28.95 6.931, 56	30.577 .856,9 0
Transportasi dan Pergudangan	13.877 .715,0 2	14.929 .948,8 7	16.25 9.293, 39	17.50 6.914, 87	18.762 .202,1 8	19.96 9.549, 69	20.91 8.710, 72	17.55 1.681, 82	17.99 8.206, 60	19.030 .284,4 8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.248. 916,05	1.329. 396,18	1.420. 410,2 8	1.557. 102,4 3	1.693. 494,32	1.832. 878,5 6	1.981. 559,3 8	1.665. 504,5 0	1.759. 794,2 6	2.037. 909,66
Informasi dan Komunikasi	7.676. 466,96	8.322. 873,30	9.080. 556,0 8	9.934. 334,8 2	10.802 .637,2 5	11.72 3.224, 81	12.74 6.455, 37	13.96 3.888, 87	14.86 0.125, 99	15.902 .746,1 6
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.856. 679,93	4.041. 345,16	4.188. 231,4 7	4.524. 388,2 9	4.619. 805,20	4.665. 415,8 0	4.772. 024,5 2	4.836. 004,2 2	5.244. 995,5 7	5.482. 903,87
Real Estat	2.472. 327,36	2.609. 894,33	2.748. 095,8 3	2.895. 556,3 3	3.025. 615,61	3.166. 853,1 9	3.381. 414,7 9	3.388. 828,9 2	3.470. 473,9 0	3.671. 085,25

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	547.78 1,96	585.98 5,89	620.6 07,06	651.2 84,00	685.06 3,40	722.4 25,15	767.2 45,89	736.7 05,29	745.0 35,01	799.63 6,39
Jasa Pendidikan	4.357. 636,21	4.657. 618,64	5.022. 030,6 9	5.416. 448,8 3	5.954. 627,35	6.382. 703,0 6	6.889. 400,0 2	7.235. 888,6 7	7.368. 894,0 1	7.746. 797,40
Jasa Kesehatan Kegiatan Sosial	1.620. 725,60	1.749. 926,04	1.881. 299,0 0	1.984. 293,5 2	2.154. 588,55	2.311. 450,4 1	2.485. 722,5 7	2.705. 243,0 8	2.864. 364,9 5	2.994. 266,46
Jasa Lainnya	1.918. 497,74	2.067. 170,04	2.264. 684,3 2	2.476. 536,9 8	2.673. 386,50	2.883. 397,9 8	3.099. 509,4 1	2.786. 312,0 2	2.984. 222,6 0	3.338. 856,59
Produk Domestik Regional Bruto	125.94 0.634, 28	133.34 0.836, 42	140.7 19.47 4,20	148.1 34.24 3,87	155.98 4.364, 13	163.9 96.18 9,06	172.2 05.57 1,31	169.4 26.61 4,11	175.0 00.50 1,95	182.62 9.542, 51

Sumber Data: Provinsi Sumatera Barat Selatan Dalam Angka 2013-2022

**Tabel 3. Location Question Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2022**

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata - Rata	Kategori
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,66	1,66	1,67	1,67	1,66	1,66	1,67	1,64	1,65	1,66	<b>1,66</b>	Sektor Basis
Pertambangan dan Penggalian	0,86	0,86	0,87	0,90	0,91	0,90	0,90	0,87	0,89	0,90	0,89	
Industri Pengolahan	0,77	0,78	0,80	0,80	0,80	0,83	0,80	0,78	0,77	0,78	0,79	
Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,72	0,73	0,71	0,71	0,71	0,71	0,69	0,69	0,67	0,65	0,70	
Konstruksi	1,10	1,10	1,09	1,10	1,12	1,12	1,13	1,09	1,08	1,09	<b>1,10</b>	Sektor Basis

Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,76	0,78	0,78	0,79 511 7	0,80 563 2	0,80 472 7	0,81 458 3	0,81 651 6	0,80 100 7	0,80 533 6	0,80	
Transportasi dan Pergudangan	0,33	0,33	0,33	0,32 845 4	0,33 270 2	0,33 728 1	0,34 891 3	0,36 756 9	0,37 986 7	0,37 622 1	0,35	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,99	0,96	0,96	0,97 253 9	0,98 953 5	0,98 667 2	0,98 812 9	1,01 729 2	1,02 792 1	0,98 940 2	0,99	
Infomasi dan Komunikasi	1,05	1,03	1,02	1,02 555 1	1,04 325 4	1,04 775 5	1,05 164 1	1,02 388 2	1,02 472 5	1,02 995 2	<b>1,04</b>	Sektor Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,76	0,75	0,75	0,73 583 6	0,73 426 3	0,72 945 3	0,73 400 1	0,72 264 4	0,70 456 7	0,70 114 7	0,73	
Real Estat	0,72	0,72	0,73	0,72 799 6	0,73 220 5	0,73 020 8	0,72 253 3	0,71 761 8	0,71 067 1	0,69 838 6	0,72	
Jasa Perusahaan	0,13	0,12	0,12	0,12 294 4	0,12 279 3	0,12 269 4	0,12 304 3	0,12 238 6	0,12 091 9	0,11 796 9	0,12	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,08	1,07	1,05	1,05 593 5	1,06 138 3	1,07 026 6	1,05 530 5	1,04 881 4	1,04 902 4	1,03 155 3	<b>1,06</b>	Sektor Basis
Jasa Pendidikan	0,78	0,77	0,77	0,78 393 3	0,76 198 4	0,75 412 3	0,75 347 3	0,74 367 2	0,75 745 2	0,75 805 1	0,76	
Jasa Kesehatan Kegiatan Sosial	0,95	0,95	0,95	0,94 905 9	0,94 211 6	0,94 299 5	0,94 483 6	0,92 011 3	0,92 014 8	0,92 386 9	0,94	
Jasa Lainnya	0,64	0,62	0,60	0,61 307 4	0,61 728 8	0,62 153 1	0,64 263 1	0,61 623 5	0,59 945 6	0,60 281 9	0,62	

Dalam Tabel 3, hasil perhitungan metode LQ untuk data PDRB sepuluh tahun terakhir (2013 hingga 2022) menunjukkan bahwa dari 17 sektor lapangan usaha di Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat 4 sektor dengan nilai rata-rata LQ>1. Keempat sektor inilah yang dianggap sebagai sektor basis, sementara 14 sektor lainnya memiliki nilai LQ<1.

### 1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Dalam rentang tahun 2013 hingga 2022, terjadi fluktuasi dalam nilai LQ Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Mulai dari 1,66 pada tahun 2013, LQ ini naik menjadi 1,67 pada tahun 2015, sebelum kembali turun ke 1,64 pada tahun 2020. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB juga mengalami variasi, dengan persentase



tertinggi sebesar 42,23% pada tahun 2015 dan terendah sebesar 36,93% pada tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi sektor ini juga berubah-ubah, dengan kisaran antara 1,18% pada tahun 2020 hingga 5,55% pada tahun 2014 dan 2015. Meskipun demikian, terdapat cenderung penurunan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini pada tahun 2020.

## **2. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**

Dalam rentang waktu 2013 hingga 2022, terjadi fluktuasi nilai Location Quotient (LQ) pada Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Pada tahun 2013, LQ sektor ini adalah 1,08 dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 6,80% dan pertumbuhan ekonomi sektor sebesar 2,96%. Pada tahun 2015, LQ turun menjadi 1,05 dengan kontribusi 5,68% terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi sektor 3,33%. Tren kenaikan terlihat pada tahun 2016 dengan LQ 1,06, kontribusi 5,94%, dan pertumbuhan 5,19%. Pada tahun 2020, LQ tetap 1,05, kontribusi meningkat menjadi 7,02%, namun pertumbuhan ekonomi sektor mencatat angka negatif, yaitu -0,59%. Pada tahun 2022, LQ menurun menjadi 1,03, kontribusi sektor 6,8%, dan pertumbuhan ekonomi sektor sebesar 0,89%. Pada tahun 2014, LQ mencapai 1,07 dengan kontribusi 6,35% terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi sektor 1,23%.

## **3. Sektor Konstruksi**

Dalam periode 2013 hingga 2022, hasil perhitungan Location Quotient (LQ) menunjukkan fluktuasi nilai dan kecenderungan penurunan pada tahun 2020 untuk Sektor Konstruksi. Pada tahun 2013, LQ sektor ini adalah 1,10 dengan kontribusi 9,34% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi sektor sebesar 12,73%. Meskipun LQ tetap 1,10 pada tahun 2014, kontribusi dan pertumbuhan ekonomi sektor ini mengalami peningkatan dan mencapai 9,38% serta 6,03%. Tahun 2015 menunjukkan LQ sektor 1,09 dengan kontribusi 9,61% dan pertumbuhan ekonomi 6,13%. Pada tahun 2017, LQ mencapai 1,12 dengan kontribusi 10,62% dan pertumbuhan ekonomi sektor 9,48%. Puncak kontribusi dan pertumbuhan terjadi pada tahun 2019 dengan LQ 1,13, kontribusi 11,55%, dan pertumbuhan ekonomi sektor 8,47%. Namun, pada tahun 2020, LQ kembali ke angka 1,09 dengan kontribusi 11,57%, tetapi pertumbuhan ekonomi sektor mencatat angka negatif, yaitu -2,95%. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan pemulihan dengan LQ 1,09, kontribusi 11,59%, dan pertumbuhan ekonomi sektor berturut-turut sebesar 2,18% dan 2,51%.

## **4. Sektor Informasi dan Komunikasi**

Dalam periode 2013 hingga 2022, hasil perhitungan Location Quotient (LQ) menunjukkan fluktuasi nilai dan kecenderungan penurunan pada tahun 2020 untuk Sektor Informasi dan Komunikasi. Pada tahun 2013, LQ sektor ini adalah 1,05 dengan kontribusi 5,90% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi sektor sebesar 9,98%. Pada tahun 2014, LQ turun menjadi 1,03 dengan kontribusi 5,78% dan pertumbuhan ekonomi sektor 5,96%. Tahun 2015 menunjukkan LQ sektor 1,02 dengan kontribusi 5,40% dan pertumbuhan ekonomi 8,58%. Pada tahun 2017, LQ mencapai 1,04 dengan kontribusi 5,71% dan pertumbuhan ekonomi sektor 10,73%. Pada tahun 2020, LQ kembali ke angka 1,02 dengan kontribusi 6,86%, dan

pertumbuhan ekonomi sektor mencapai 9,55%. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan LQ menjadi 1,02 dan 1,03, dengan kontribusi sektor berturut-turut sebesar 7,01% dan 7,18%, serta pertumbuhan ekonomi sektor masing-masing sebesar 6,42% dan 7,02%.

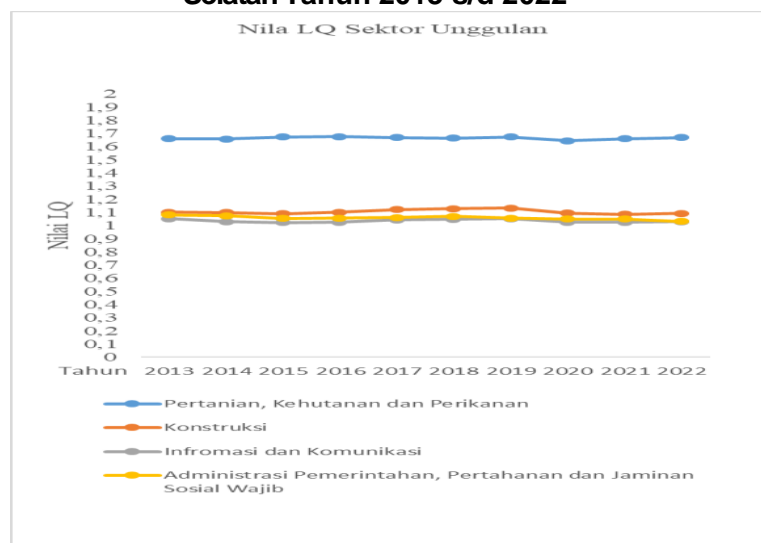
Analisis nilai *Location Quotient* (LQ) untuk Sektor Informasi dan Komunikasi dari tahun 2013 hingga 2022 menunjukkan pola fluktuasi yang cukup menarik. Pada periode awal (2013-2015), LQ mengalami penurunan, menandakan bahwa sektor ini tumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Peningkatan LQ dari 2017 hingga 2019 mencerminkan kontribusi yang lebih besar dari sektor Informasi dan Komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam LQ, yang konsisten dengan dampak global Pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan perlambatan ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat, dan hal ini tercermin dalam penurunan kontribusi sektor Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB.

Peningkatan kembali LQ pada tahun 2021-2022 mencerminkan adanya pemulihan ekonomi setelah masa-masa sulit pada tahun 2020. Meskipun fluktuasi ini dipengaruhi oleh kondisi global dan nasional, sektor Informasi dan Komunikasi tetap menjadi bagian yang signifikan dari struktur ekonomi daerah.

Grafik perkembangan LQ keempat sektor basis tersebut selama periode 2013 hingga 2022 akan memberikan visualisasi lebih lanjut tentang dinamika pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor Informasi dan Komunikasi terhadapnya.

**Grafik 1. Perkembangan Location Quotient (LQ) Sektor Basis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013 s/d 2022**



Dengan nilai LQ yang stabil selama sepuluh tahun terakhir, perkembangan sektor basis di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kestabilan yang menggemblirakan.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menonjol sebagai sektor utama dengan LQ tertinggi, tetap stabil di sekitar angka 1,6. Ini menunjukkan kontribusi yang besar terhadap struktur ekonomi daerah.

Sektor Konstruksi, meskipun dengan LQ yang sedikit lebih rendah, tetap stabil di sekitar angka 1,1, menunjukkan keberlanjutan dalam pertumbuhannya. Begitu pula dengan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib serta Informasi dan Komunikasi, yang tetap stabil di angka 1 selama sepuluh tahun terakhir.

Kestabilan nilai LQ ini menandakan bahwa sektor-sektor basis ini memiliki potensi yang layak untuk pengembangan lebih lanjut, dan penting untuk terus memantau pertumbuhannya di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini merupakan indikasi positif untuk keberlanjutan dan kestabilan ekonomi daerah.

## **SIMPULAN**

Dalam rangka menentukan sektor lapangan usaha unggulan (basis) suatu daerah, metode Location Quotient (LQ) dapat diaplikasikan dengan membandingkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah yang lebih rendah dengan data PDRB wilayah di atasnya. Hasil analisis metode LQ terhadap data PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat selama periode 2013 hingga 2022 menunjukkan adanya empat sektor lapangan usaha basis dari total 17 sektor yang membentuk PDRB Kabupaten Pesisir Selatan. Keempat sektor tersebut adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Konstruksi; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta Sektor Informasi dan Komunikasi. Lapangan usaha yang unggul dari segi kontribusi di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2013 hingga 2022 mencakup sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor konstruksi; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; serta sektor informasi dan komunikasi. Di sisi laju pertumbuhan, sektor informasi dan komunikasi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa pendidikan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta jasa lainnya menonjol sebagai sektor-sektor dengan pertumbuhan yang baik. Hasil analisis LQ juga mengidentifikasi dua sektor lapangan usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sektor basis, yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ( $LQ=0,99$ ) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial ( $LQ=0,94$ ). Kedua sektor ini menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi paling besar di Kabupaten Pesisir Selatan, namun pertumbuhannya agak lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memiliki laju pertumbuhan yang agak lambat, sementara sektor informasi dan komunikasi menonjol dengan pertumbuhan tertinggi. Keempat sektor basis tersebut sejalan dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, di mana sektor pertanian mendukung transformasi ekonomi berbasis agroindustri dan pariwisata, sektor konstruksi berkontribusi pada infrastruktur berkualitas, dan sektor informasi dan komunikasi relevan dengan transformasi tata kelola birokrasi. Berdasarkan hasil kajian

terhadap sektor lapangan usaha unggulan dengan metode LQ, beberapa kebijakan dapat direkomendasikan. Pertama, untuk sektor pertanian, perlu ditingkatkan produksi, produktivitas, dan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, sektor konstruksi perlu didorong dengan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan kabupaten, irigasi, dan pengembangan kawasan strategis. Ketiga, sektor administrasi pemerintahan perlu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik. Keempat, sektor informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan konektivitas internet untuk mengatasi titik-titik blank spot. Kelima, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki potensi untuk menjadi sektor basis, dan perlu dikembangkan melalui optimalisasi pengelolaan wisata dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2023). *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023*. Sumatera Barat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. (2023). *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2023*. Pesisir Selatan: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2023). *Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2023*. Sumatera Barat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. (2023). *Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2023*. Pesisir Selatan: Badan Pusat Statistik.
- Barełkowski, R., & Wojtyra, B. (2018). Programowanie sanacji przestrzeni wiejskiej. Autorskie mechanizmy planistyczne na rzecz zrównoważonego kształtowania obszarów wiejskich. *Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica*, 32. <https://doi.org/10.18778/1508-1117.32.02>
- Dabengwa, I. M., Nyati-Jokomo, Z., Chikoko, L., Makanga, P. T., Nyapwere, N., & Makacha, L. (2023). A participatory learning approach for the development of a maternal mobile health technology in Zimbabwe. *Development Southern Africa*, 40(2), 421–440. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2022.2059449>
- Høyland, S. A., Schuchert, A., & Mamen, A. (2022). A holistic perspective on continuing care for substance use and dependence: Results and implications from an in-depth study of a Norwegian continuing care establishment. *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 39(5), 503–520. <https://doi.org/10.1177/14550725221099702>
- Leolmin, O. V. (2021). Analisis Struktur Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi NTT. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 20–28.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Painan: 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-

2030. Painan : 2010.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025. Painan: 2010.
- Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Painan: 2010.
- Tan, S. (2010). Perencanaan pembangunan (Teori dan implementasi pada pembangunan daerah). *Jambi: Fakultas Ekonomi Universitas Jambi*.
- Tarigan, R. (2004). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*.
- Tora, I., Kalangi, J. B., & Rompas, W. I. (2022). Analisis Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2010-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 22*(1).
- Undang-undang Nomor 25. (2004). Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). *Jakarta, Bappenas*.